



Edit

Hapus

Beranda &gt; News

Konten dari Pengguna

# Ironi Hari Kesaktian Pancasila: Martabat Guru dan Insentif Seratus Ribu

**FX Risang Baskara**

Akademisi yang percaya teknologi harus inklusif. Mengajar di Universitas Sanata Dharma, meneliti tentang teknologi pendidikan. Menulis untuk berbagi, berkarya untuk...

2 Oktober 2025 15:43 WIB · waktu baca 5 menit

1

0



:

*Tulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan*

Pagi ini, 1 Oktober, bangsa kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah hari untuk merenungi keteguhan ideologi kita di hadapan rongrongan sejarah. Tema tahun ini pun terdengar begitu gagah: "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya". Di tengah suasana khidmat ini, saya justru membaca sebuah berita yang terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Badan Gizi Nasional (BGN), dengan niat yang mungkin baik, mengumumkan akan memberikan insentif sebesar Rp 100 ribu per hari bagi guru yang bersedia menjadi penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saya sejenak tertegun. Di hari kita merayakan "kesaktian" sebuah ideologi yang sila kelimanya menyerukan "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", kita justru melahirkan kebijakan yang terasa begitu tidak adil bagi para guru. Di hari kita bicara tentang "Pancasila Perekat Bangsa", kita justru membuat kebijakan yang berisiko merenggangkan hubungan sakral antara guru, siswa, dan panggilan mendidiknya.

Di benak terdalam saya, yang terbayang bukanlah wajah guru yang tersenyum lega, melainkan gambaran seorang guru Pendidikan Pancasila yang seharusnya sedang merancang cara agar nilai-nilai



terhadap semangat Pancasila itu sendiri.

Sakti di Panggung, Terluka di Ruang Kelas. Sumber: Ilustrasi generatif DALL-E, OpenAI.

## Keadilan Sosial Semu dan Jebakan Transaksional

Kebijakan ini, bagi saya, adalah puncak gunung es dari cara pandang negara yang semakin dangkal dan transaksional terhadap pendidikan. Kita punya masalah sistemik, lalu solusinya adalah lembaran uang seratus ribuan. Kita gagal membangun sistem pengadaan pangan yang aman untuk program MBG, lalu kita pikir dengan membayar seorang guru untuk "mengawasi" di hilir, masalah akan selesai. Ini bukan cerminan Keadilan Sosial; ini adalah cerminan dari pemindahan tanggung jawab yang dibungkus dengan uang.

Tentu saja, saya tidak naif. Saya bisa membayangkan bagaimana bagi seorang guru honorer yang gajinya seringkali tak cukup untuk hidup layak, uang Rp 100 ribu itu mungkin terasa seperti berkah sesaat. Saya tidak menyangkal realitas pahit itu di lapangan. Tapi di situlah letak tragedi yang lebih besar. Negara seolah berbisik di telinga mereka: "Kami tahu gajimu sebagai pendidik tidak cukup, maka inilah, kerjakan tugas tambahan ini, dan kau akan dapat uang tambahan." Martabat profesi yang seharusnya dijamin oleh sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" direduksi menjadi pekerja harian yang bisa disewa untuk tugas apa pun, selama ada insentifnya.

Jika saja program MBG ini dirancang dengan kualitas dan profesionalisme sejak awal (dikelola oleh tenaga logistik yang kompeten, bukan oleh guru) maka "tugas-tugas receh" ini tidak akan pernah ada. Kesejahteraan guru yang sejati, yang sejalan dengan prinsip Keadilan Sosial, seharusnya datang dari gaji yang memartabatkan profesi mereka. Bukan dari insentif untuk melakukan pekerjaan sampingan yang dipaksakan oleh kegagalan sistem.

## Korban Sebenarnya: Matinya Pembelajaran Mendalam

Namun, korban dari kebijakan ini bukan hanya martabat guru. Korban yang paling tak terlihat, namun paling fatal, adalah kualitas pembelajaran itu sendiri. Saat ini, kurikulum baru kita sedang bergerak menuju sebuah visi luhur yang disebut Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*). Sebuah pendekatan yang saya yakini bisa menjadi jawaban atas krisis pendidikan kita. Intinya, pembelajaran bukan lagi soal transfer materi, melainkan soal menciptakan



Bagaimana ia bisa menjadi pendidik yang *mindful*? *Mindfulness* dalam mengajar berarti hadir seutuhnya di dalam kelas. Menangkap binar mata siswa yang akhirnya paham sebuah konsep sulit, atau menyadari keresahan siswa yang duduk di pojok belakang. Bisakah seorang guru hadir seutuhnya, ketika otaknya masih terus berputar memikirkan, "Apakah pasokan telur untuk besok sudah dikonfirmasi? Bagaimana jika sayur sopnya datang terlambat lagi seperti kemarin?" Beban kognitif dari tugas logistik ini adalah musuh utama dari kehadiran penuh seorang pendidik.

Lalu, bagaimana ia bisa menciptakan pembelajaran yang *joyful*? Kegembiraan mengajar itu lahir dari percikan kreativitas dan energi positif yang menular ke siswa. Kegembiraan itu tidak akan muncul dari seorang guru yang lelah dan tertekan karena harus berdebat dengan sopir pengantar katering di pagi hari. Yang ada bukanlah kegembiraan, melainkan kelelahan; sebuah kelelahan yang pasti akan terasa di atmosfer kelas.

Dan yang paling krusial, bagaimana ia bisa merancang pengalaman yang *meaningful*? Pembelajaran yang bermakna lahir dari refleksi mendalam seorang guru; dari waktu yang ia habiskan untuk membaca dan menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata siswanya. Ketika waktu dan energi mental seorang guru habis tersedot untuk urusan nasi kotak, kita sedang merampok kesempatan mereka untuk merancang makna bagi anak didik kita.

Pada akhirnya, guru yang tidak lagi *mindful*, tidak *joyful*, dan kehabisan energi untuk mencari meaning, tidak akan mungkin bisa menciptakan Pembelajaran Mendalam bagi murid-muridnya. Apalagi menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kompleks. Kebijakan ini, secara tidak langsung, sedang menyabotase visi pendidikannya sendiri.

Seratus Ribu untuk Martabat? Sumber: Ilustrasi generatif DALL-E, OpenAI.

## Kesaktian Pancasila yang Sesungguhnya

Di Hari Kesaktian Pancasila ini, kita diajak merenung. Kesaktian Pancasila yang sesungguhnya tidak terletak pada upacara-upacara seremonial atau slogan-slogan yang indah. Kesaktiannya teruji di ruang-ruang kebijakan, di setiap keputusan yang diambil pemerintah.



nilai Pancasila, caranya bukanlah dengan memberi insentif harian untuk tugas di luar profesi mereka. Caranya adalah dengan memberikan gaji yang layak agar mereka bisa hidup sejahtera. Caranya adalah dengan membebaskan mereka dari belenggu administrasi, agar mereka bisa fokus pada anak didik. Caranya adalah dengan membangun sistem pendukung yang solid, sehingga guru bisa kembali menjadi guru seutuhnya.

Kebijakan insentif ini, pada akhirnya, bukanlah sebuah langkah maju. Ini adalah sebuah pengakuan terselubung bahwa sistem kita telah gagal menghargai guru secara profesional. Di hari yang sakral ini, mari kita maknai Kesaktian Pancasila secara lebih substantif. Mari kita wujudkan kesaktian itu dengan memperjuangkan kebijakan yang memanusiakan manusia, yang menjunjung tinggi keadilan, dan yang mengembalikan martabat guru ke tempatnya yang paling terhormat.

Pendidikan adalah soal menumbuhkan manusia, bukan sekadar mengisi perut dan mengisi formulir. Dan guru, adalah seniman yang memahat jiwa, bukan mandor proyek distribusi makanan. Semoga kita lekas sadar, sebelum profesi ini benar-benar tergadai.

Salam Cerdas dan Humanis.

[Pendidikan](#) [Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi](#)

[Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah](#) [Sekolah dan Pendidikan Anak](#) [MBG](#)

[Makan Bergizi Gratis](#) [Insentif](#) [Kesaktian Pancasila](#) [Guru](#)



U

Transitional loading...

Loading...

U

Transitional loading...

Loading...



FX Risang Baskara



News Entertainment Tekno & Sains Otomotif Food & Travel Bisnis Woman Bola & Sports Mom Bolanita Lainnya :

Breaking News Green Initiative Halal Living Video Story Audio Story Trending kumparanPLUS Opini & Cerita